

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat (Hendra, 2017). Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang mana semua warga negaranya memiliki hak setara atau hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah kehidupan mereka. Demokrasi mengizinkan warga masyarakat dalam suatu negara untuk berpartisipasi. Demokrasi mencakup segala aspek kehidupan yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara tanpa ada unsur paksaan atau terintimidasi dari pihak luar. Demokrasi berarti kekuasaan tertinggi pada rakyat dengan azas yang sering kita dengar yaitu “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”.

Demokrasi di Indonesia berkembang seiring dengan pergolakan politik yang terjadi dengan setelah kemerdekaan. Perubahan konsep demokrasi terjadi mulai dari demokrasi terpimpin, demokrasi parlementer sampai ke demokrasi presidensiil. Peranan pemerintahan dalam menjalankan demokrasi masih sangat dominan, karena dalam UUD 1945 beserta amandemennya, masih nampak kekuasaan pemerintahan tetap lebih besar dibanding kekuasaan lainnya. (Irawan, 2007). Ada 5 model demokrasi yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi sosial, demokrasi partisipasi dan demokrasi konstitusional (repository.uin-suska.ac.id). Contoh pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah pelaksanaan pemilu, baik pemilu eksekutif, pemilu legislatif dan pemilu lainnya. Pemilu dilaksanakan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Demokrasi dapat dilakukan di semua elemen kehidupan masyarakat salah satunya contohnya adalah demokrasi di lingkup kampus seperti pelaksanaan pemilu raya (Pemira).

Universitas Muhammadiyah Ponorogo merupakan salah satu kampus yang menerapkan sistem demokrasi dalam menetapkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), yaitu berupa pemilihan umum raya (Pemira). Pada tahun 2019 kemarin, Universitas Muhammadiyah Ponorogo melakukan Pemira serentak untuk memilih calon pemimpin dari BEM-U (Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas) yang familiar disebut Presma atau Presiden mahasiswa dan BEM-F (Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas) yang familiar disebut Gubma (Gubernur mahasiswa), dimana organisasi tersebut merupakan media yang menjembatani antara mahasiswa dan universitas, mulai dari tingkat prodi atau jurusan, fakultas hingga universitas.

Kampus diibaratkan sebagai miniatur sebuah negara yang didalamnya juga ada lembaga eksekutif dan legislatif. Lembaga eksekutif sendiri mulai dari tingkat program studi sampai universitas yaitu HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan), BEM-Fakultas dan BEM-Universitas, sedangkan lembaga legislatif nya adalah DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa). Setiap tahun ormawa kampus tersebut selalu mengalami regenerasi kepemimpinan atau pergantian pengurus. Salah satu moment pergantiannya kepengurusannya ditandai dengan adanya pemira.

Pemira atau singkatan dari Pemilihan Umum Raya merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai wujud ajang pembelajaran praktik demokrasi untuk memilih calon-calon pemimpin mahasiswa (Alhafizh, 2016). Pemira dilaksanakan dan digelar “dari mahasiswa, oleh mahasiswa dan untuk mahasiswa” sedangkan birokrasi atau kampus hanya membiayai dan memfasilitasi kegiatan tersebut. Adanya pemira mahasiswa dapat belajar dan memahami urgensi sebenarnya mengenai pentingnya belajar partisipasi politik di kampus melalui kegiatan pemira.

Pemilihan Umum Raya (Pemira) merupakan wahana bagi mahasiswa dalam menggunakan hak politiknya untuk memilih seseorang yang dianggap pantas dan layak sebagai wakilnya untuk duduk di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) baik tingkat universitas, fakultas hingga jurusan. Setiap mahasiswa memiliki kebebasan individu dalam menentukan dan menggunakan hak pilihnya tanpa takut terhadap ancaman dalam bentuk

apapun. Pemenuhan hak tersebut dijamin undang-undang, untuk itu pihak kampus harus melindungi hak politik mahasiswa dari berbagai ancaman dari pihak luar.

Pemira (Pemilihan Umum Raya) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali di tingkat Jurusan/Prodi, Fakultas dan Universitas. Pemira (Pemilihan Umum Raya) sendiri diselenggarakan oleh KPUM (Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa). KPUM merupakan organisasi yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemira. KPUM dibentuk oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan ditinjau oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dengan melalui beberapa tahapan seleksi. Selain itu kinerja KPUM dan pelaksanaan pemira juga diawasi oleh panwasra (Panitia Pengawas Pemira).

Secara general mahasiswa selama ini dianggap sebagai kaum terdidik atau kaum intelektual, pemilih yang rasional dan memiliki idealisme yang sangat tinggi dalam hal menentukan pemimpinnya. Maka dari itu, dalam pemira penentuan wakil dari mahasiswa diharapkan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo mampu memilih pemimpin baru yang mempunyai semangat dan visi misi yang sesuai dengan harapannya masing-masing.

Dengan adanya Pemilihan Umum Raya (Pemira) pada tahun 2019, banyak hal baru menjadi sorotan seperti mulai adanya pemira berarti kampus sudah menerapkan asas demokrasi dalam menentukan regenerasi kepemimpinan selanjutnya. Adanya pemira mengajarkan praktek demokrasi dan partisipasi politik mahasiswa di lingkup kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo sebelum mahasiswa terjun ke masyarakat dan praktek politik yang sebenarnya. Selain itu dengan adanya pemira, dapat menilai bagaimana peran mahasiswa dalam menghadapi pesta demokrasi di lingkup kampus yang dikemas dalam sebuah kontestasi politik untuk menentukan siapa calon pemimpin kedepannya. Apakah mahasiswa berpartisipasi aktif dalam pemira atau malah bersikap acuh terhadap pesta demokrasi yang ada di kampus.

Pemilihan umum raya (Pemira) di Universitas Muhammadiyah Ponorogo baru dilaksanakan 2 (dua) kali, yakni tahun 2018 dan 2019. Pemira ini merupakan bentuk inovasi dan memberikan pembelajaran demokrasi

kepada mahasiswa, tetapi dalam pelaksanaan masih mengalami kendala karena masih minimnya pengalaman dari mahasiswa dalam melaksanakan praktik demokrasi pada mahasiswa seperti pemira ini. Selain itu juga partisipasi mahasiswa dalam pemira 2019 juga masih rendah. Judul penelitian ini hanya sekedar mempertegas dalam pelatihan praktek demokrasi dalam lingkup kampus yang merupakan salah satu praktek politik praktis, tapi dalam penelitian ini belum sepenuhnya dapat dikatakan praktek politik praktis, karena pada pelaksanaan pemira 2019 di Universitas Muhammadiyah Ponorogo belum ada partai politik atau partai pengusung. Jadi belum dapat sepenuhnya seperti praktek politik praktis seperti yang dilaksanakan pada sebuah Negara yang sebenarnya.

Dari pemaparan di atas peneliti ingin mengulik lebih dalam tentang praktik demokrasi di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang dikemas dalam suatu event yang dinamakan pemira. Tepatnya pemira yang dilaksanakan pada tgl 30 September 2019 kemarin. Selain itu untuk melihat juga seberapa jauh partisipasi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo dalam menghadapi pesta demokrasi pemira tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di latar belakang, peneliti memfokuskan penelitian tersebut dalam suatu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan demokrasi di kampus?
- b. Bagaimana tingkat partisipasi mahasiswa dalam pemilu raya Badan Eksekutif Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pelaksanaan demokrasi di kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan momentum pemilihan umum raya Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

- b. Mengetahui tingkat partisipasi mahasiswa dalam pemilu raya Badan Eksekutif Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan dampak sebagai bahan riset dan ilmu pengetahuan dengan memaparkan teori-teori pemikiran ilmiah. Selain itu dengan adanya penelitian ini bisa menambah pengetahuan peneliti dan pembaca pada umumnya serta lebih memperdalam lagi pengetahuan tentang demokrasi di kampus dan partisipasi mahasiswa dalam pemilihan umum raya (pemira) di tingkat kampus.

b. Secara Praktis

1. Bagi penulis

Penelitian ini bisa menambah wawasan keilmuan dan keterampilan dalam menyusun sebuah penelitian karya tulis ilmiah.

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat membuka kesadaran mahasiswa untuk berpartisipasi menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum raya (pemira) Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan mengurangi tingkat apatisme di lingkungan kampus.

3. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat dengan adanya penelitian ini bisa memberikan pengetahuan, pengalaman dan masukan terhadap pelaksanaan praktik demokrasi dan partisipasi mahasiswa dalam pemilihan umum raya (pemira) di tingkat kampus.

E. Penegasan Istilah

Agar terhindar dari melebarnya pengertian serta kesalahpahaman pembaca dalam menafsirkan kata-kata dan peristilahan yang ada di penelitian ini maka perlu dibuatkan penegasan istilah sebagaimana berikut ini :

a. Demokrasi

Demokrasi adalah pandangan hidup atau gagasan yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuannya yang sama bagi semua warga Negara (KBBI, 1989 : 195) dalam (Lensi Megah Retta, 2017)

b. Kampus

Kampus merupakan tempat yang digunakan mahasiswa untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah menyelesaikan pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan secara terbuka. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi atau vokasi (Ciptaningrum et al., 2019)

c. Partisipasi Politik

Partisipasi politik menurut Maran, dalam (Vadzila, 2018) mendeskripsikan bahwa partisipasi politik sebagai usaha terorganisir oleh para warga Negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk jalannya kebijaksanaan umum. Seseorang atau sekelompok orang yang terlibat dalam kehidupan berpolitik secara aktif disebut sebagai wujud partisipasi politik.

d. Pemira

Pemira adalah pemilihan umum raya. Pemira merupakan wujud dari partisipasi politik. Pelaksanaan pemira tidak berbeda jauh dengan

pelaksanaan pemilu di Indonesia. Bedanya pemira lingkup pelaksanaannya di tingkat kampus. Pemira menjadi salah satu wadah untuk mahasiswa mengimplementasikan partisipasi politik mereka di tingkat kampus. Pemira dapat dijadikan alat sarana mahasiswa dalam memupuk rasa partisipasi politik sejak dini dan meningkatkan kesadaran pentingnya berpartisipasi di dalam kampus, karena itu akan menjadi tolak ukur kedepannya tentang bagaimana roda pemerintahan dalam kampus terus berputar dan berjalan. (Vadzila, 2018)

e. Badan Eksekutif Mahasiswa

Badan Eksekutif Mahasiswa atau sering disingkat BEM merupakan lembaga eksekutif yang ada di kampus yang terdiri dari beberapa pengurus yang berasal dari berbagai latar belakang mahasiswa. BEM sendiri terdapat tingkatannya yaitu BEM tingkat Fakultas dan BEM tingkat Universitas. (Okke Oscar; Agassi Moriand, 2018)

F. Landasan Teori

Pada penelitian ini dibutuhkan adanya kerangka dasar teori yang digunakan sebagai bukti secara teoritis. Salah satu bentuk dari pembuktian penelitian ini adalah berupa teori menurut beberapa pakar. Landasan teori ini berisi tentang teori yang berhubungan dengan judul dan fokus penelitian.

a. Teori Demokrasi

Demokrasi secara bahasa atau secara etimologis yaitu “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demokrasi adalah keadaan Negara dimana sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat (Rosyada, 2000).

Menurut Joseph A. Schmeter dalam (Hendra, 2017), demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

Menurut Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik (Winarno, 2014).

Pesta Demokrasi merupakan sebuah perayaan yang besar, pesta yang besar untuk rakyat dalam menyambut ajang untuk terlaksananya sebuah kehendak politik bagi masyarakat dalam memilih atau mengukung kontestan atau bakal calon yang dianggap pantas untuk menduduki jabatan atas amanah rakyat, atau menjadi pemimpin yang dipilih sesuai keinginan yang dipercaya oleh rakyat. (Sacipto, 2019)

Secara garis besar, untuk mengukur tingkat demokrasi ada beberapa indikator yang dapat digunakan. Robert Dahl mengemukakan indikator tersebut : (1) Akuntabilitas, (2) Rotasi kekuasaan, (3) Rekrutmen politik yang terbuka, (4) Pemilihan umum, (5) Menikmati hak-hak dasar (Akbar, 2016).

b. Partisipasi Politik

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu "*pars*" yang artinya bagian dan "*capere*" yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik Negara. Apabila digabung menjadi satu berarti "mengambil bagian". Berdasarkan bahasa inggris, "*partisipate*" atau "*participation*" berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik Negara.

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Menurut Miriam Budiarmo menyatakan bahwa partisipasi politik

secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan public (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubunga (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya. (*BAB II Kajian Teori, n.d.*)

Menurut Ife dan Tesoriero dalam (Zakhir, 2017) partisipasi adalah sebuah konsep sentral dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat karena diantara banyak hal terkait erat dengan gagasan hak asasi manusia. Menurut Janda dkk, partisipasi politik merupakan kegiatan masyarakat yang mempengaruhi atau dorongan terhadap pemerintahan dan dunia politik.

Adapun bentuk-bentuk dari partisipasi politik adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan pemilihan mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon atau suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil proses pemilihan.
2. *Lobbying*, merupakan cakupan upaya perorangan maupun kelompok untuk menghubungi pejabat pemerintahan dan pemimpin politik dengan tujuan mempengaruhi keputusan yang akan dibuat.
3. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuan utamanya adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
4. Mencari koneksi (*contacting*) merupakan tindakan perorangan kepada pejabat pemerintahan yang bertujuan memperoleh manfaat untuk satu orang atau segelintir orang
5. Tindakan kekerasan (*violence*) merupakan suatu bentuk partisipasi politik dan untuk keperluan analisis serta bertujuan untuk mendefinisikan sebagai satu kategori tersendiri. Hal ini berarti

mempengaruhi hasil keputusan dengan cara menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda (Samuel P Huntington; John Nelson, 1994).

Adapun bentuk-bentuk partisipasi politik sendiri meliputi :

1. Bentuk konvensional

Yaitu bentuk partisipasi yang normal sah dan lazim dalam demokrasi modern seperti pemberian suara (voting), diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok berkepentingan, komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrative.

2. Bentuk non konvensional

Yaitu termasuk beberapa tindakan yang mungkin legal maupun illegal, penuh kekerasan dan revolusioner seperti pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi, mogok, tindakan kekerasan politik terhadap harta benda (perusakan, pembakaran, pengeboman), tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan dan pembunuhan), perang gerilya dan revolusi (Atriyani, n.d.).

Sedangkan tipologi partisipasi politik menurut A. Rahman H.I (2007:228) dalam (*BAB II Kajian Teori*, n.d.) menjelaskan bahwa secara umum tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan sebagai berikut :

1. Partisipasi aktif, adalah partisipasi yang berorientasi pada proses awal (input) dan hasil (output).
2. Partisipasi pasif, adalah yang berorientasi pada output (hasil), artinya hanya mematuhi peraturan yang ada, menerima dan melakukan apa saja yang menjadi keputusan pembuat kebijakan.
3. Golongan putih (golput), disebut sebagai kelompok yang apatis karena menganggap sistem politik yang ada menyimpang dan jauh dari yang dicita-citakan.

Milbart dan Goel yang dikutip oleh Cholisin (2007:152) partisipasi politik dibedakan menjadi beberapa kategori antara lain :

1. Partisipasi politik apatis, yaitu orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
2. Partisipasi politik spektor, yaitu orang yang setidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
3. Partisipasi politik gladiator, yaitu orang yang secara aktif terlibat di dalam proses politik, yakni sebagai komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis politik, pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.
4. Partisipasi politik pengritik, yaitu orang yang berpartisipasi politik dalam bentuk yang tidak konvensional.

c. Pemira

Pemira adalah Pemilihan Umum Raya yang biasanya diselenggarakan oleh berbagai Universitas atau Institut di Indonesia. Pemira diselenggarakan guna untuk melatih mahasiswa dalam memahami dan mengerti dunia politik sebelum masuk dalam dunia masyarakat Indonesia yang demokratis. Terwujudnya kemahasiswaan yang demokratis tidak terlepas dari partisipasi politik (Vadzila, 2018).

Pemira (Pemilihan Umum Raya) diselenggarakan untuk memilih wakil mahasiswa sebagai kepengurusan dalam roda organisasi atau yang disebut sebagai ORMAWA. Pemilihan umum raya dilaksanakan layaknya pemilu yang digelar di Indonesia, perbedaannya hanya saja pemira ruang lingkupnya berada di ranah atau lingkungan kampus.

Prinsip-prinsip pemira sama seperti prinsip umum pemilu yaitu sebagai berikut :

1) Langsung

Mahasiswa sebagai rakyat pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya sendiri dan tanpa paksaan serta tanpa perantara.

2) Umum

Pemilihan bersifat umum yang berarti menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua mahasiswa di kampus tertentu tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, golongan dan status sosial.

3) Bebas

Setiap mahasiswa bebas atas hak memilihnya dan menentukan pilihannya tanpa ada unsur tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Pada pelaksanaan haknya, setiap mahasiswa dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan keinginan hatinya.

4) Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa suara atau pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak lain dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan hak suaranya dalam surat suara dengan tidak diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan.

5) Jujur

Pada penyelenggaraan pemira, setiap pemilih dan peserta pemira, pelaksana pemira, pengawas pemira, pemantau pemira serta semua yang berkaitan dengan pemira harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6) Adil

Dalam penyelenggaraan pemira, setiap pemilih dan peserta pemira mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Penggunaan asas luber jurdil sebagai asas atau dasar pemilihan umum pemimpin atau ketua badan eksekutif di dalam kampus merupakan konsekuensi yang logis dari pelaksanaan pemilihan umum raya (pemira) secara demokratis. Sehingga apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka hal itu merupakan pelanggaran dan harus diberikan konsekuensi berupa sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional yang digunakan untuk mengoperasionalkan penelitian yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Definisi operasional dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Pemilu Raya Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo diukur dengan indikator :

1. Pelaksana pemira UMPO 2019
2. Tugas dan wewenang panitia pelaksana pemira
3. Proses pelaksanaan pemira 2019
4. Sosialisasi pemira
5. Apakah pelaksanaan pemira sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku
6. Idealitas pelaksanaan pemira
7. Mekanisme penghitungan suara dari hasil pemira
8. Kendala yang dihadapi ketika pemira
9. Harapan setelah adanya pemira

b. Partisipasi Mahasiswa yang diukur disini :

1. Pendapat calon presiden mahasiswa dan gubernur mahasiswa :
 - a. Tanggapan diadakannya pemira
 - b. Alasan berkompetisi dalam pemira 2019
 - c. Sosialisasi calon
 - d. Efektivitas pemira
2. Tingkat partisipasi mahasiswa dalam pemira 2019.
3. Hasil kuesioner yang disebar meliputi :
 - a. Pengetahuan mahasiswa tentang adanya pemira 2019
 - b. Pengetahuan mahasiswa tentang jadwal pemira 2019
 - c. Sosialisasi yang didapatkan mahasiswa tentang pemira
 - d. Pengetahuan mahasiswa tentang calon yang harus dipilih dalam pemira
 - e. Tingkat partisipasi mahasiswa dalam pemira
 - f. Partisipasi mahasiswa dalam pemilu lainnya

- g. Prosentase pengguna hak pilih dalam pemira 2019
- h. Alasan mahasiswa tidak memilih
- i. Tanggapan mahasiswa mengenai adanya pemira
- j. Harapan mahasiswa terhadap calon yang terpilih

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dikarenakan pemilu raya Badan Eksekutif Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Ponorogo baru dilaksanakan 2 (dua) kali, yakni tahun 2018 dan 2019. Penetapan lokasi penelitian ini sangatlah penting dalam rangka mempertanggung jawabkan data ataupun informasi yang diperoleh.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian campuran kualitatif-kuantitatif (*mix methods*), yaitu suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk pendekatan penelitian, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Artinya data yang dikumpulkan berupa hasil observasi, wawancara, kuesioner (angket) serta dokumen-dokumen pendukung. Mix methods adalah metode penelitian dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian yakni kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan objektif. (Sugiyono, 2013)

Adanya kuesioner dalam penelitian ini untuk memperkuat data yang diperoleh. Hasil dari kuesioner ini hanya untuk menentukan prosentase untuk memperkuat analisis data yaitu dengan diagram lingkaran.

3. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer adalah data langsung yang diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer harus dicari melalui narasumber dan responden yaitu orang yang dijadikan obyek penelitian atau sarana untuk mendapatkan informasi ataupun data. Data primer dalam penelitian ini adalah panitia penyelenggara pemilu raya, paslon yang berkompetisi dalam pemilu raya dan beberapa mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo Tahun 2019.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dari dokumen-dokumen, buku, jurnal, berita ataupun yang lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu. Percakapan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dari yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan atas itu. Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menggunakan menilai keadaan seseorang. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga mendapatkan data informasi yang orientik.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam dan jumlah informannya sedikit/kecil. Dalam hal ini teknik yang digunakan dengan memilih informan menggunakan teknik purposive

sampling (pengambilan sampel berdasarkan tujuan). Dalam purposive sampling, siapa yang akan diambil sebagai anggota sampel diserahkan kepada pertimbangan pengumpulan data yang menurut peneliti sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak struktur, dan wawancara ini dapat dilakukan secara tatap muka langsung (face to face) maupun dengan melalui media perantara seperti telepon.

2. Kuesioner

Pengisian kuesioner ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana partisipasi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo dalam pemilu raya Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo tahun 2019. Pengisian kuesioner dilakukan lewat google form yang disebarluaskan secara random kepada mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan link <https://forms.gle/vyx3asCyJ7HtfBfy8> dan kemudian mereka mengisi pertanyaan yang tersedia dalam google form. Hasil dari kuesioner ini bertujuan sebagai penguat analisis data dengan mengetahui proesestase yang didapat.

3. Pengamatan / observasi

Observasi (observation) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi merupakan teknik untuk menggali data dari sumber yang berupa tempat, kegiatan, benda ataupun rekaman gambar. Melalui observasi dapat dilihat dan di uji kebenaran suatu peristiwa atau kegiatan. Observasi dapat dikatakan merupakan kegiatan turun langsung ke lokasi penelitian dengan melakukan pencatatan ataupun perekaman dengan tujuan memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencatat data-data atau dokumentasi-dokumentasi yang ada, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumentasi. Dalam penelitian ini, fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap data primer yang diperoleh dari observasi, kuesioner (angket) dan wawancara mendalam.

5. Teknik Pemilihan Informan

Informan adalah seseorang yang mengetahui atau terlibat langsung dengan penelitian yang diteliti dan dapat memberikan fakta atau informasi mengenai suatu hal yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti. Dalam penentuan informan peneliti menggunakan purposive sampling yaitu dengan menentukan sejumlah informan dengan cara sengaja karena dengan alasan yang diketahui sifat sampel tersebut. Informan yang dipilih dianggap memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenai permasalahan yang sedang diteliti dan perolehan sumber data secara langsung. Adapun informan yang telah ditentukan dalam penelitian ini antara lain: KPUM (Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa), PANWASRA (Panitia Pengawas Pemira), dan Calon Ketua BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa). Sedangkan penentuan responden di dalam penelitian ini dilakukan secara random kepada mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan mengisi kuesioner melalui google form.

6. Analisis Data

Dalam sebuah penelitian diperlukan analisis data yang berguna untuk memeriksa jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode *mix methods* (campuran kualitatif-kuantitatif). Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.

Sedangkan metode kualitatif-kuantitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data statistik deskriptif berupa angka-angka, diagram prosentase dan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamat (Sugiyono, 2013).

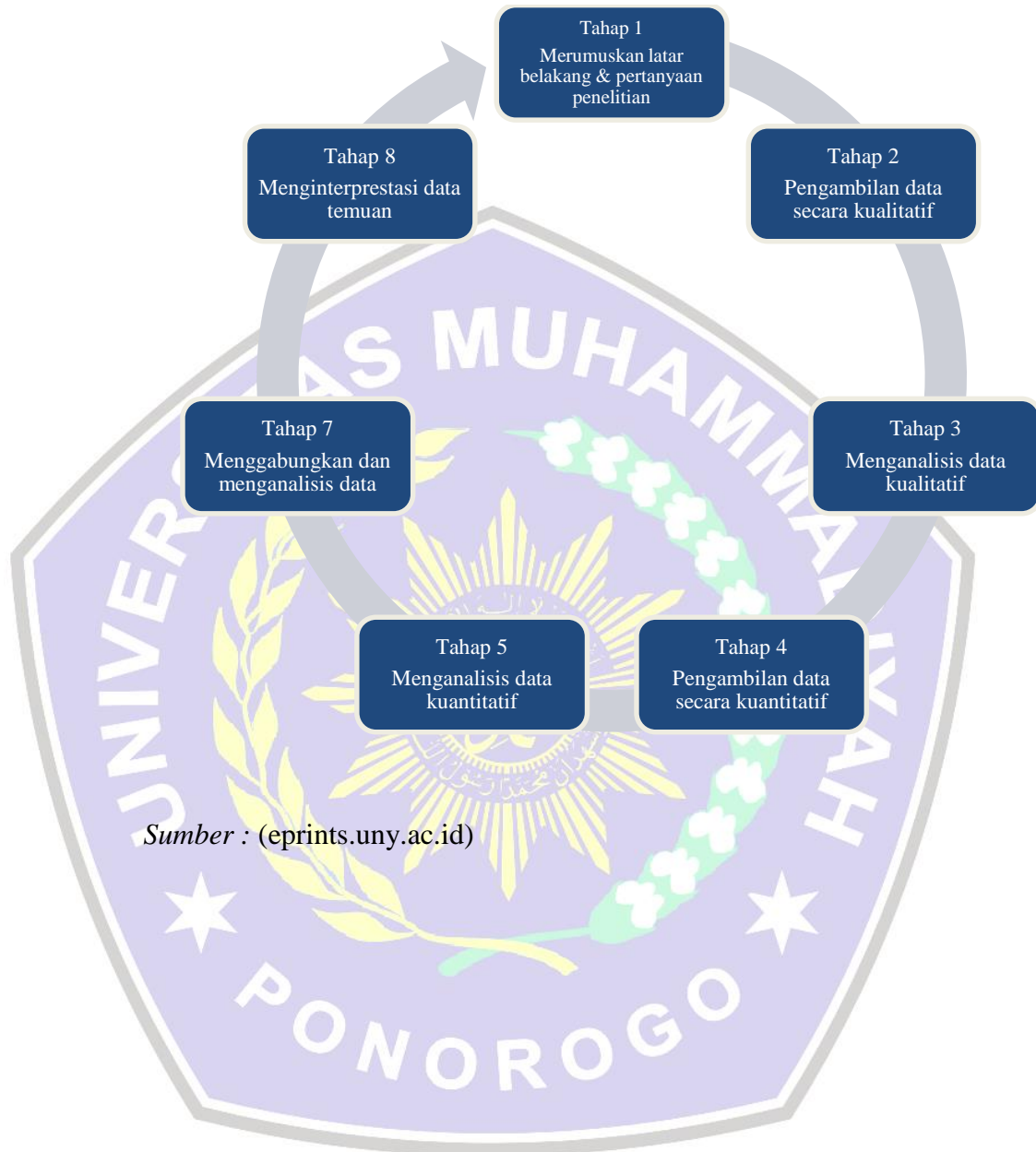
Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Tahap pertama, peneliti mengumpulkan data kualitatif dengan melakukan wawancara secara terstruktur.
2. Tahap dua, peneliti melakukan analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
3. Tahap ketiga, peneliti mengumpulkan data kuantitatif melalui kuesioner (angket) lewat google form.
4. Tahap keempat, peneliti melakukan analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif dilakukan dengan metode statistik deskriptif yaitu dengan membuat diagram lingkaran dengan perolehan data prosentase.
5. Tahap terakhir dengan melakukan interpretasi keseluruhan data. Pada tahap terakhir ini, peneliti mendiskusikan data kualitatif dan kuantitatif dengan cara memaparkan data hasil penemuan kualitatif, kuantitatif dan mix methods. Kemudian peneliti memberikan penjelasan secara mendalam terhadap hasil temuan dan menarik kesimpulan dari hasil temuan yang didapat.

Adapun rancangan penelitian mix methods dalam skripsi ini dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini:

Gambar 1.1

Proses Analisis Data Penelitian Kualitatif Kuantitatif



Sumber : (eprints.uny.ac.id)